

EVALUASI KEBIJAKAN PEMEKARAN KECAMATAN TANAH PINOH BARAT KABUPATEN MELAWI

Albe Yulestian¹, AB. Tangdililing², Asmadi³

Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Magister Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Kebijakan pemekaran Kecamatan Tanah Pinoh Barat belum memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, karena masih dipengaruhi minimnya dukungan sarana dan prasarana serta aparatur yang memadai seperti dalam pembinaan pemerintahan desa dan pemberian pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Dilihat dari efektivitas peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemekaran tersebut belum memberikan manfaat maksimal untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan perekonomian. Dibidang pendidikan, masih terbatas jumlah fasilitas pendidikan dan tenaga pendidik. Dibidang kesehatan, fasilitas kesehatan masih belum merata di tiap desa dan tenaga kesehatan juga masih minim. Dibidang infrastruktur, belum ada perubahan berarti terhadap kondisi infrastruktur jalan dan listrik kepada masyarakat. Dibidang perekonomian, kondisi kemiskinan yang dialami penduduk masih belum tertangani dengan baik. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemekaran Kecamatan Tanah Pinoh Barat belum berjalan dengan efektif sebagaimana yang diharapkan.

Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan, Pemekaran, Kecamatan.

¹ PNS

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan wujud dari upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal bagi masyarakat. Sehingga diharapkan dengan adanya otonomi daerah masyarakat mendapatkan apa yang menjadi harapannya selama ini, karena pelayanan langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Disadari dengan perubahan paradigma pemerintahan daerah tersebut membuat segala upaya pembangunan dalam rangka mengatasi kemiskinan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat adalah merupakan tanggungjawab daerah yang besar untuk diemban dan dilaksanakan. Sejalan dengan hal tersebut, dan menyikapi aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik cepat dan murah, maka penataan pemerintahan dilakukan di berbagai daerah berupa penataan wilayah pemerintahan melalui pemekaran kecamatan, dengan tujuan akselerasi pembangunan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Melawi merupakan salah satu kabupaten baru di Provinsi Kalimantan Barat hasil pemekaran Kabupaten Sintang yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Melawi memiliki wilayah yang cukup luas yaitu 10.640,80 Km², dengan jumlah penduduk 492.799 jiwa. Luasnya wilayah tersebut, tentu akan mempengaruhi kualitas pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan dan kependudukan karena jarak antar desa yang jauh dari pusat-pusat pemerintahan. Kondisi ini juga akan berdampak terhadap percepatan pembangunan di desa-desa terpencil dan terisolir di Kabupaten Melawi baik pembangunan fisik maupun nonfisik. Kondisi ini sejalan dengan fakta di lapangan yang selama ini menunjukkan adanya desa-desa yang jauh dari pusat pemerintahan (ibu kota kabupaten dan kecamatan) cenderung kurang mendapat perhatian pembangunan dari pemerintah. Dalam rangka mempercepat pembangunan wilayah, maka diperlukan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperpendek jarak pelayanan publik di Kabupaten Melawi. Dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Melawi mengambil langkah dengan melakukan pemekaran beberapa wilayah kecamatan. Pemekaran kecamatan tersebut dilakukan melalui kajian mendalam sebagaimana ketentuan yang berlaku yaitu dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah dan potensi ekonomi.

Diketahui bahwa, pada saat dibentuknya Kabupaten Melawi hanya terdapat 7 kecamatan. Namun seiring dengan adanya tuntutan dan aspirasi masyarakat serta dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, pada tahun 2007 Kabupaten Melawi melakukan pemekaran 7 kecamatan menjadi 11 kecamatan. Adapun kecamatan-kecamatan baru tersebut adalah Kecamatan Pinoh Utara dan Pinoh Selatan (pemekaran dari Kecamatan Nanga Pinoh), Kecamatan Belimbing Hulu (pemekaran Kecamatan Belimbing) dan Kecamatan Tanah Pinoh Barat (pemekaran Kecamatan Tanah Pinoh). Kecamatan Tanah Pinoh Barat merupakan hasil pemekaran dari wilayah Kecamatan Tanah Pinoh yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Melawi Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Kecamatan Pinoh Utara, Kecamatan Pinoh Selatan,

Kecamatan Belimbing Hulu, dan Kecamatan Tanah Pinoh Barat. Adapun luas wilayah Kecamatan tanah Pinoh Barat adalah 82, 75 Km² yang terdiri dari 10 desa yaitu Desa Ulak Muid, Harapan Jaya, Togan Baru, Durian Jaya, Pelita Jaya, Lintah Taum, Laja, Keluas Hulu, Bukit Raya dan Gahang.

Selama kurang lebih 5 tahun dimekarkan menjadi kecamatan baru, pembentukan Kecamatan Tanah Pinoh Barat telah memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama dalam hal pelayanan kependudukan, dimana masyarakat tidak perlu menempuh jarak yang jauh apabila akan mengurus masalah administrasi kependudukan seperti pembuatan dan perpanjangan kartu tanda penduduk (KTP), dan pelayanan kependudukan lainnya. Kemudahan dalam pelayanan kependudukan tersebut kurang sejalan dengan bidang-bidang lainnya seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan yang hingga saat ini fasilitas baik pendidikan maupun kesehatan masih minim di Kecamatan Tanah Pinoh Barat, demikian pula halnya dengan pembangunan infrastruktur seperti jalan akses antar desa. Keadaan ini menunjukkan bahwa kebijakan pemekaran wilayah Kecamatan Tanah Pinoh Barat belum sepenuhnya memberikan jawaban atas permasalahan publik yang terjadi di wilayah kecamatan tersebut. Dengan kata lain manfaat besar yang diharapkan dari pembentukan kecamatan tersebut belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh masyarakat.

Berdasarkan indikasi permasalahan tersebut di atas, perlu dilakukan penelitian mengenai evaluasi kebijakan pemekaran wilayah Kecamatan Tanah Pinoh Barat, guna mengetahui sejauhmana dampak yang dihasilkan dari kebijakan pemekaran tersebut.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah “Evaluasi efektivitas dampak implementasi kebijakan pemekaran Kecamatan Tanah Pinoh Barat”.

3. Perumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana efektivitas dampak implementasi kebijakan pemekaran Kecamatan Tanah Pinoh Barat Kabupaten Melawi?”.

B. TINJAUAN LITERATUR

Dye mengatakan definisi kebijakan sebagai apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan (Dye, 1995:1). Berdasarkan definisi tersebut, penulis mendapat pemahaman bahwa terdapat perbedaan antara apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah dan apa yang sesungguhnya harus dikerjakan oleh pemerintah. Definisi lain mengenai kebijakan yang diungkapkan oleh Friedrich (1963:79) yang mengatakan kebijakan adalah: “Kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.

Menurut Easton (dalam Wahab, 2001:5) kebijakan negara diartikan sebagai pengalokasian nilai secara paksa dan syah kepada anggota masyarakat. Dari pendapat tersebut, ada ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan negara yang bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan oleh orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik, yakni para ketua adat, ketua suku, eksekutif, legislatif, hakim, administrator dan sebagainya. Merekalah orang-orang yang dalam kesehariannya terlibat dalam urusan-urusan politik dan sistem politik dan dianggap oleh sebagian besar warga, sistem politik sebagai pihak yang bertanggung jawab atas urusan-urusan politik dan berhak mengambil tindakan tertentu sepanjang masih dalam batas-batas peran dan kewenangan mereka.

Selanjutnya, Anderson (dalam Wahab, 2001:3) merumuskan kebijakan sebagai “langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi”. Mirip dengan pendapat Anderson, kebijakan publik menurut Mustopadidjaya (1996:41) merupakan “suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah negara dan pembangunan” (Wahab, 2001:4)

Anderson (dalam Subarsono, 2005:23-24) sebagai pakar kebijakan publik menetapkan dalam rangka memecahkan masalah ada beberapa tahap penting antara lain :

1. Penetapan agenda kebijakan (*agenda setting*), menentukan masalah publik yang perlu untuk dipecahkan.
2. Formulasi kebijakan (*policy formulation*) mengidentifikasi kemungkinan kebijakan yang mungkin digunakan dalam memecahkan masalah.
3. Adopsi kebijakan (*policy adoption*) menentukan pilihan kebijakan melalui dukungan para administrator dan legislative. Tahap ini ditentukan setelah melalui tahap suatu proses rekomendasi.
4. Implementasi kebijakan (*policy implementation*) merupakan suatu tahap dimana kebijakan yang telah diadopsi tadi dilaksanakan oleh unit-unit tertentu dengan memobilisasi dana dan sumber daya yang ada.
5. Penilaian kebijakan (*policy assessment*) berbagai unit yang telah ditentukan melakukan penilaian tentang apakah semua proses implementasi telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan atau tidak.

Implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, biasanya dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan, Perintah Eksekutif atau Dekrit Presiden. Nugroho (2006:4). mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah” Selain itu, ia juga mengatakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2001:10) merumuskan proses implementasi kebijakan sebagai “Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau

swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”. Lebih jauh Meter dan Horn (dalam Wahab 2001:11) menekankan bahwa tahap implementasi tidak dimulai pada saat tujuan dan sasaran kebijakan publik ditetapkan, tetapi tahap implementasi baru terjadi selama proses legitimasi dilalui dan pengalokasian sumber daya, dana yang telah disepakati. Studi implementasi kebijakan menekankan pada pengujian faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran kebijakan.

Ada dua hal mengapa implementasi kebijakan pemerintah memiliki relevansi, yaitu: (1) memberikan masukan bagi pelaksanaan operasional program, sehingga dapat dideteksi apakah program berjalan sesuai dengan yang telah dirancang, serta mendeteksi kemungkinan tujuan kebijakan negatif yang ditimbulkan, (2) memberikan alternatif model pelaksanaan program yang lebih efektif. Udoji (dalam Wahab, 2001:59) dengan tegas mengatakan bahwa *“The execution of policies is as important of not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue print file jackets unless they are implemented”* (pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).

Islamy (1991:107-108), menjelaskan bahwa tugas dan kewajiban pejabat dan badan-badan pemerintah bukan hanya dalam perumusan kebijakan negara, tetapi juga dalam pelaksanaan kebijakan. Keduanya sama-sama penting, tetapi dalam kenyataannya banyak pejabat dan badan-badan pemerintah lebih dominan peranannya dalam perumusan kebijakan, kurang dalam implementasi kebijakan, dan masih lemah sekali dalam menyebarluaskan kebijakan-kebijakan baru kepada masyarakat. Hal tersebut menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan kebijakan. Jeleknya proses komunikasi akan menjadi titik lemah dalam mencapai efektivitas pelaksanaan kebijaksanaan negara.

Beberapa pendekatan dalam implementasi kebijakan publik adalah Pendekatan secara *top-down*, yaitu pendekatan secara satu pihak dari atas ke bawah. Dalam proses implementasi peranan pemerintah sangat besar, pada pendekatan ini asumsi yang terjadi adalah para pembuat keputusan merupakan aktor kunci dalam keberhasilan implementasi, sedangkan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses implementasi dianggap menghambat, sehingga para pembuat keputusan meremehkan inisiatif strategi yang berasal dari level birokrasi rendah maupun subsistem-subsistem kebijaksanaan yang lain. Kedua adalah pendekatan secara *bottom-up*, yaitu pendekatan yang berasal dari bawah (masyarakat). Pendekatan *bottom-up* didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih melibatkan pejabat pemerintahan namun hanya ditataran rendah. Asumsi yang mendasari pendekatan ini adalah bahwa implementasi berlangsung dalam lingkungan pembuat keputusan yang terdesentralisasi. Model ini menyediakan suatu mekanisme untuk bergerak dari level birokrasi paling bawah sampai pada pembuatan keputusan tertinggi di sektor publik maupun sektor privat. Dalam pelaksanaannya implementasi kebijakan publik memerlukan model implementasi

yang berlainan, karena ada kebijakan publik yang perlu diimplementasikan secara *top-down* atau secara *bottom-up*. Kebijakan-kebijakan yang bersifat *top-down* adalah kebijakan yang bersifat secara strategis dan berhubungan dengan keselamatan negara, seperti kebijakan mengenai antiterorisme, berbeda dengan kebijakan yang lebih efektif jika diimplementasikan secara *bottom-up*, yang biasanya berkenaan dengan hal-hal yang tidak secara langsung berkenaan dengan *national security*.

Satu hal yang paling penting adalah implementasi kebijakan haruslah menampilkan keefektifan dari kebijakan itu sendiri, menurut Nugroho (2006) pada prinsipnya harus memenuhi empat tepat dalam rangka keefektifan implementasi kebijakan, yaitu :

1. Apakah kebijakannya sendiri sudah tepat. Ketepatan kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan.
2. Ketepatan pelaksana. Aktor implementasi bukan hanya pemerintah, ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah/masyarakat/swasta atau implementasi kebijakan yang diswastakan (*privatization* atau *contracting out*)
3. Ketepatan target implementasi, Ketepatan di sini berdasarkan atas tiga hal, yaitu: pertama, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi yang lain. Kedua, apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi ataukah tidak, ketiga, apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaiki implementasi kebijakan sebelumnya
4. Apakah lingkungan implementasi sudah tepat, Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu (1) lingkungan kebijakan, merupakan interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dan lembaga lain yang terkait; (2) lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri atas *public opinion*, persepsi publik akan kebijakan dan imlementasi kebijakan, *interpretive institutions* yang berkenaan dengan interpretasi dari lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat.

Islamy (2001:45) mengatakan bahwa suatu kebijakan negara akan menjadi efektif bila dilaksanakan dan mempunyai dampak positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain tindakan atau perbuatan manusia yang menjadi anggota masyarakat bersesuaian dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Dengan demikian, jika mereka tidak berbuat atau bertindak sesuai dengan keinginan pemerintah/Negara itu, maka kebijakan negara menjadi tidak efektif.

Sementara itu, keberhasilan implementasi menurut Grindle (dalam Subarsono, 2005:94) dipengaruhi oleh dua variabel utama yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Isi kebijakan mencakup: (1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan; (2) jenis manfaat yang akan dihasilkan; (3) derajat perubahan yang diinginkan; (4) kedudukan pembuat kebijakan; (5) siapa pelaksana program; (6) sumber daya yang dikerahkan. Variabel lingkungan kebijakan mencakup: (1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rezim yang sedang

berkuasa; (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. Dalam konteks implementasi kebijakan pemekaran kecamatan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah bahwa pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 dalam pasal 2 dikatakan bahwa kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemekaran 1 (satu) kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan atau lebih, dan atau penyatuan wilayah desa atau kelurahan dari beberapa kecamatan. Pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus memenuhi syarat administratif, teknis serta fisik kewilayahan.

Menurut Sedarmayanti (dalam Hariyoso, 2002: 162) terdapat beberapa dimensi pelayanan yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah, diantaranya :

1. Pelayanan tanpa diskriminasi dari lembaga-lembaga publik/kedinasan;
2. Penerapan prinsip kesederhanaan, kejelasan, kepastian, keamanan, keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan yang merata, dan ketepatan waktu;
3. Berkualitas, dalam arti kesesuaian dengan tuntutan, kecocokan bagi pemakaian dan kebebasan dari cacat;
4. Terjamah, handal, akuntabilitas mutu pelayanan, jaminan, dan empati;
5. Berorientasi pada kualitas yang dicirikan oleh partisipasi aktif, empati dan kepuasan yang dilayani. Jika semua dimensi di atas dapat ditegakkan oleh birokrasi publik dalam proses layanan, maka tuntutan perbaikan kualitas birokrasi sapat diwujudkan.

Selanjutnya Dunn (1998:608) menyamakan evaluasi dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilai. Dalam arti yang spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Dengan demikian evaluasi kebijakan, tidak lain adalah mengukur kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan, dan mengukur seberapa jauh telah terjadi penyimpangan dan ketidakpastian. Evaluasi adalah upaya yang berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Sehingga tujuan evaluasi adalah untuk menilai secara keseluruhan pengaruh dan dampak pada akhir program, yang akan menjadi landasan untuk meningkatkan atau menyempurnakan kebijakan berkenaan dengan program/kebijakan berikutnya (Riyadi, 2003:268). Jadi, evaluasi dilakukan pada akhir pelaksanaan suatu program. Oleh karena itu kita perlu membedakan antara monitoring dan evaluasi.

Hogwood (dalam Dye, 1992:220) mengelompokkan dampak atas lima komponen berikut:

- a. Dampak atas kelompok sasaran atau lingkungan
- b. Dampak atas kelompok lain (*spillover effects*)
- c. Dampak atas masa depan

- d. Dampak atas biaya langsung
- e. Dampak atas biaya tidak langsung.

Di dalam analisis kebijakan, evaluasi memiliki beberapa arti penting. Menurut Dunn (1998:211-113) fungsi utama dari evaluasi dalam analisis kebijakan adalah:

- 1). Hal yang paling penting dari fungsi evaluasi adalah memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran telah dicapai yang berkaitan seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.
- 2). Memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan sasaran. Nilai-nilai yang digunakan sebagai dasar pemilihan tujuan dan sasaran tersebut dapat diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target serta dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan sasaran dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Dalam menanyakan kepantasan tujuan dan sasaran, analisis dapat menguji alternatif sumber nilai dari berbagai kepentingan kelompok maupun landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas seperti aspek teknis, ekonomis, legal, sosial, dan substantif.
- 3). Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang bersifat deskriptif untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki dan dilaksanakan di Kecamatan Tanah Pinoh Barat Kabupaten Melawi. Penentuan subyek dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *purposive* yang terdiri dari :

- a. Kepala dan Staf Bappeda Kabupaten Melawi.
- b. Kepala dan Staf BPS Kabupaten Melawi.
- c. Camat Tanah Pinoh Barat.
- d. Anggota DPRD Kabupaten Melawi yang berjumlah 8 orang.
- e. Masyarakat Kecamatan Tanah Pinoh Barat terutama Tokoh Masyarakat yang berjumlah 10 orang.
- f. Mahasiswa yang berasal dari Kecamatan Tanah Pinoh Barat berjumlah 5 orang.

Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara (*in-depth interview*) dan dokumentasi dengan alat berupa pedoman observasi, panduan

Wawancara (*interview guidance*) dan alat pencatat dan perekam dokumentasi yang terdiri dari kamera, photo copy dan catatan lapangan.

D. HASIL PENELITIAN

1. Analisis Dampak Kebijakan

a. Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Hasil wawancara penulis dengan informan diperoleh keterangan bahwa, sejak dibentuk tahun 2007 penyelenggaraan pemerintahan Tanah Pinoh Barat sudah terlaksana dengan baik, namun didorong dengan sumber daya aparatur yang sesuai pada posisinya akan lebih maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam upaya mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Tanah Pinoh Barat sebagai kecamatan baru, perlu didukung dengan keberadaan sumber daya pegawai negeri sipil yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kualitas pegawai itu sendiri.

Sejak dilaksanakannya otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Melawi telah melakukan reorganisasi perangkat daerah yang diwujudkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi. Peraturan Daerah tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Melawi Nomor 23 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersebut,

Berkaitan dengan pelaksanaan wewenang dalam memfasilitasi penyusunan peraturan desa diperoleh keterangan bahwa pihak kecamatan belum seluruhnya mampu melaksanakan wewenang dalam membantu memfasilitasi desa dalam membuat peraturan desa, hal ini dikarenakan belum terdapat inisiatif yang tinggi dari para Kepala Desa dan Aparat Desa di Kecamatan Tanah Pinoh Barat untuk menyusun daft tentang peraturan desa. Sementara apabila melihat kondisi masing-masing desa di Tanah Pinoh Barat banyak yang harus dibuat regulasi untuk menciptakan ketentraman masyarakat dan pembangunan desa. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Camat Tanah Pinoh Barat, diperoleh keterangan bahwa belum dibuatnya peraturan Desa juga dipengaruhi sumber daya Kepala Desa dan aparatur desa, di mana mereka belum memiliki pengetahuan yang luas untuk membuat peraturan desa.

Mengenai kendala yang dihadapi oleh Camat dalam melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Tanah Pinoh Barat, dari hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa, untuk menyelenggarakan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa seperti proses pembuatan peraturan desa, peraturan kepala desa, maupun keputusan kepala desa, memang belum bisa dilaksanakan kepada seluruh desa di Kecamatan Tanah Pinoh Barat, karena keterbatasan SDM yang dimiliki kecamatan. Kapasitas aparatur desa dalam penyusunan kebijakan desa masih sangat rendah, hal ini terlihat dari jumlah kebijakan/peraturan desa yang disusun. Minimnya kemampuan dan kemauan Kepala Desa ini menyebabkan berbagai peraturan desa yang seharusnya dapat disusun bersama dengan perangkat desa lainnya sampai saat ini belum terwujud. Untuk proses

penyusunan APBDesa yang merupakan bagian dari peraturan desa belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Kepala Desa.

Diketahui bahwa, Kantor Camat Tanah Pinoh Barat belum didukung dengan pegawai/staf yang memadai serta ketersediaan sarana dan prasarana kantor dalam menunjang aktivitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Tanah Pinoh. Kondisi ini memberikan gambaran bahwasannya pelaksanaan kewenangan Camat dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Tanah Pinoh Barat belum terlaksana dengan baik disebabkan oleh berbagai kendala, baik yang datang dari institusi kecamatan maupun pemerintahan desa. Dari segi institusi kecamatan terlihat bahwa belum adanya dukungan sumber daya yang memadai baik dari segi SDM, sarana dan prasarana transportasi hingga permasalahan non teknis lainnya menyangkut kondisi geografis desa di Kecamatan Tanah Pinoh Barat yang letaknya berjauhan dari Ibu Kota Kecamatan.

Secara umum bahwa, pemekaran Kecamatan Tanah Pinoh Barat dalam rangka mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan antara Kecamatan dan Desa belum terlaksana dengan baik. Hanya saja mengingat semakin dekatnya rentang kendali tersebut, upaya untuk mengefektifkan program-program pembangunan yang melibatkan pemerintahan kecamatan dan desa akan lebih mudah dilaksanakan.

b. Efektivitas Pemberian Layanan Administrasi Kependudukan

Berdasarkan analisis tingkat kecukupan pelayanan publik yang dirasakan masyarakat meningkat dimana sebelum pemekaran masyarakat menilai kecukupan kebutuhan pelayanan publik. Namun demikian perubahan persepsi atas kecukupan kebutuhan pelayanan publik ini masih dibawah rata-rata artinya masyarakat masih mengharapkan lebih atas kecukupan akan pelayanan publik yang ada di Kecamatan Tanah Pinoh Barat. Ketersediaan pelayanan publik bagi masyarakat akan terkait dengan ketersediaan dan kemampuan aparatur pemerintah, sebagai pelayanan masyarakat pemerintah harus mampu memberikan pelayanan optimal kepada pelanggan. Persepsi masyarakat atas kualitas aparatur pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik pada saat sebelum dimekarkan dari hasil wawancara dengan beberapa orang warga menunjukkan bahwasannya mereka tidak terlalu menilai aspek kualitas aparatur dalam memberikan pelayanan, karena yang lebih penting bagi mereka adalah output pelayanan tersebut. Kondisi ini dapat dimaklumi karena kondisi masyarakat di Kecamatan Tanah Pinoh Barat yang merupakan daerah perdesaan berbeda dengan kondisi masyarakat perkotaan yang cenderung kritis terhadap layanan pemerintah. Selain itu masyarakat juga tidak terlalu menganggap penting berbagai dokumen kependudukan seperti KTP dan KK karena produk layanan tersebut baru diperlukan pada saat masyarakat membutuhkan.

Dalam memahami pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat, hasil wawancara lapangan menemukan bahwa pelayanan publik terkait dengan kesejahteraan masyarakat tidak sepenuhnya dipahami sebagai program pemerintah kecamatan. Terdapat kecenderungan masyarakat memaknai

pelayanan publik yang mereka terima berupa program Bantuan Langsung Tunai/BLT, Bantuan Operasional Sekolah/BOS dan Raskin. Pada kenyataannya program yang mereka sebutkan tersebut merupakan bagian dari program nasional, namun terdapat pula masyarakat yang memahami pelayanan publik sebagai akibat kebijakan pemerintah daerah seperti dalam mengurus administrasi kependudukan seperti KTP, KK lebih singkat waktunya karena mereka tidak perlu jauh-jauh lagi untuk mengurus.

Secara khusus permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di desa pedalam adalah jauhnya jarak tempuh untuk memperoleh layanan kependudukan yang tersedia di tingkat kecamatan. Hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa pelayanan masyarakat relatif lebih mudah, karena jarak tempat pelayanan seperti pembuatan KTP dan KK menjadi lebih dekat, hanya saja yang perlu digaris bawahi adalah pemekaran kecamatan, harus diimbangi dengan peran pemerintah Kecamatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membuat KTP, karena masih banyak wajib KTP di Kecamatan Tanah Pinoh yang belum memiliki KTP. Hasil wawancara ini sejalan dengan data yang penulis peroleh dimana, tahun 2009 untuk Kecamatan Tanah Pinoh Barat terdapat 7.753 wajib KTP sementara yang baru memiliki KTP hanya 4.326. Untuk KK terdapat 3.045 wajib KK sementara yang sudah memiliki hanya 1.510 (sumber : Kabupaten Melawi Dalam Angka 2010).

Diketahui juga bahwa, sudah ada perbedaan setelah Kecamatan Tanah Pinoh Barat dengan Ibu Kota Ulak Muid dimekarkan dari Kecamatan Tanah Pinoh, yang jelas untuk pelayanan administrasi kependudukan sudah semakin dekat dan mudah. Hanya saja untuk bidang-bidang lainnya memang masih kurang dan cenderung lamban. Tentu saja dengan adanya pemekaran kecamatan akan berimplikasi positif bagi kemudahan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik, karena masyarakat desa tidak perlu lagi menempuh jarak yang jauh untuk mengurus berbagai dokumen kependudukan. Informasi ini memberikan gambaran bahwasannya pemekaran kecamatan yang telah memperpendek jarak pelayanan masyarakat di Kecamatan Tanah Pinoh Barat belum sepenuhnya diimbangi dengan pemberian pelayanan yang berkualitas.

Berangkat dari informasi yang diperoleh bahwa pengurusan pembuatan KTP memang membutuhkan proses yang panjang, proses yang panjang inilah yang berdampak pada lamanya waktu yang ditempuh untuk pengurusan pelayanan tersebut. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa banyaknya masyarakat wajib KTP yang belum memiliki KTP dikarenakan belum adanya kesadaran dan pengetahuan akan pentingnya KTP, namun disisi lain pelayanan KTP juga menjadi penghalang sehingga masyarakat enggan mengurus secara langsung. Kondisi ini menggambarkan bahwa pelayanan publik bagi masyarakat memerlukan berbagai fasilitas pendukung berupa infrastruktur fisik. Persepsi masyarakat akan ketersediaan fasilitas pelayanan publik Kecamatan Tanah Pinoh Barat pada saat sebelum terjadi pemekaran. Perubahan persepsi ini merupakan gambaran atas ketersediaan pelayanan publik yang dapat diakses oleh masyarakat Kecamatan Tanah Pinoh Barat.

Penyediaan fasilitas pelayanan publik bagi masyarakat dirasakan setelah terjadi pemekaran belum sepenuhnya dapat dinikmati dengan cepat, kondisi ini juga tercermin dimana persepsi masyarakat akan ketersediaan pelayanan publik.

Persepsi masyarakat atas kualitas pelayanan publik yang diterima pada saat sebelum pemekaran masih rendah hal ini dikarenakan pada saat masih bergabung dengan Kecamatan Tanah Pinoh, masyarakat masih harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan berbagai pelayanan kependudukan karena jarak beberapa desa di Kecamatan Tanah Pinoh memang cukup jauh ditambah dengan kondisi infrastruktur yang kurang memadai. Sedangkan setelah terjadi pemekaran menjadi Kecamatan Tanah Pinoh Barat masyarakat beranggapan sudah cukup baik, khususnya dari segi aksesibilitas memperoleh pelayanan meskipun dalam proses masih mengalami permasalahan.

2. Analisis Dampak Kebijakan Pembentukan Kecamatan Tanah Pinoh Barat Terhadap Efektivitas Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

a. Pelayanan Pendidikan

Diketahui bahwa prasarana pendidikan terutama gedung sekolah di Kecamatan Tanah Pinoh Barat masih belum memadai, hal ini dikarenakan belum terdapat taman kanak-kanak, baru terdapat sekolah dasar (SD) di tiap desa, untuk sekolah dasar dari tahun 2007 seakan dimekarkan memang tidak terdapat penambahan gedung SD baru. Sementara untuk SLTP hanya terdapat di Desa Pelita Jaya, Bukit Raya, Ulak Muid dan Harapan Jaya. Semenjak dimekarkan terlihat bahwa pertumbuhan sekolah baik SD maupun SLTA/SMP sangat lambat, hanya terjadi penambahan 1 SLTP baru yaitu di Desa Harapan Jaya. Selain itu yang cukup memerhatikan adalah semenjak dibentuk tahun 2007, untuk jenjang pendidikan menengah ke atas (SLTA) belum terdapat di Kecamatan Tanah Pinoh Barat, kondisi ini tentu akan mempengaruhi partisipasi siswa untuk melanjutkan pendidikannya minimal memenuhi wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan 12 tahun.

Diperoleh keterangan bahwa, sejak dimekarkan memang terlihat bahwa prasarana pendidikan di Kecamatan Tanah Pinoh Barat tidak mengalami perkembangan yang berarti, seharusnya pemerintah sudah membangun gedung SLTA/SMA karena sampai saat ini belum ada, pentingnya pembangunan tersebut karena akan membantu siswa yang tamat dari bangku SMP untuk melanjutkan ke jenjang SMA, dan mereka tidak perlu jauh-jauh lagi ke Kota Baru untuk melanjutkan sekolah, yang penting juga bahwa berdirinya SMA akan mengurangi angka putus sekolah di Kecamatan Tanah Pinoh Barat karena tidak tersedianya SMA yang mudah dijangkau.

Masih minimnya guru SD di Kecamatan Tanah Pinoh Barat karena penyebaran guru belum merata di tiap desa. Hal yang cukup menarik antara lain yaitu rasio murid terhadap guru yang cukup rendah. Kondisi ini tentu saja akan berdampak terhadap efektivitas kegiatan belajar mengajar di sekolah. Tidak jauh berbeda dengan kondisi guru SD, jumlah guru SLTP di Kecamatan Tanah Pinoh Barat masih belum memadai, hanya di SLTP yang terdapat di

Desa Ulak Muid yang memiliki guru dengan jumlah yang sudah cukup memadai. Sementara SLTP di Desa Pelita Jaya, Harapan Jaya dan Bukit Raya masih sangat minim. Kurangnya jumlah guru akan berdampak terhadap proses belajar mengajar siswa. Berangkat dari data tersebut, menunjukkan bahwa pemekaran Kecamatan Tanah Pinoh Barat belum memberikan manfaat yang signifikan dalam rangka pemenuhan tenaga pendidik di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Sebagaimana telah dikemukakan pada penjelasan terdahulu bahwa keberadaan tenaga pendidik sangat penting dalam proses belajar mengajar siswa. Siswa/murid tidak akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang maksimal manakala tidak terdapat tenaga pendidik yang memadai.

Berdasarkan kondisi demikian menunjukkan bahwa kebijakan pemekaran Kecamatan Tanah Pinoh Barat belum diimbangi dengan penyediaan fasilitas pendidikan dan tenaga pendidikan yang memadai. Tentu saja hal ini akan berdampak terhadap SDM masyarakat, dan pada akhirnya tidak akan ada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merupakan alasan kuat dilakukannya pemekaran kecamatan.

Dalam melihat keberhasilan pemekaran wilayah di Kecamatan Tanah Pinoh Barat selain dilihat dari ketersediaan fasilitas pendidikan dan tenaga pendidik, tidak dapat dihindari harus membandingkan indikator makro sebelum dan sesudah pemekaran wilayah. Apabila terjadi peningkatan nilai (persentase) dari indikator makro di bidang pendidikan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemekaran wilayah di Kecamatan Tanah Pinoh Barat dari bidang pendidikan berdampak positif sedangkan apabila terjadi sebaliknya maka pemekaran wilayah tersebut dapat dikatakan berdampak negatif. Idealnya untuk membandingkan dampak sebelum dan sesudah adalah dengan melihat indikator makro pendidikan pada tahun 2006 (sebelum pemekaran wilayah) dan tahun 2007 – 2012 (setelah pemekaran wilayah). Karena keterbatasan informasi dan data untuk tahun 2006 tidak disajikan, namun berdasarkan indikator makro tahun 2007 – 2012 cukup menggambarkan kondisi bidang pendidikan setelah terjadi pemekaran. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kuantitas dan kualitas pendidikan masyarakat disuatu daerah adalah angka melek huruf masyarakat, angka partisipasi kasar (APK) dan angka putus sekolah

Indikator yang dapat digunakan untuk melihat proporsi penduduk yang dapat/tidak dapat membaca dan menulis adalah angka melek huruf atau buta huruf. Angka melek huruf adalah angka yang menunjukkan penduduk yang dapat membaca dan menulis. Sebaliknya, angka buta huruf adalah suatu indikator yang digunakan untuk melihat proporsi penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis. Dari data yang ada, angka melek huruf di Kecamatan Tanah Pinoh Barat dari tahun 2007 sampai tahun 2010 cenderung terjadi peningkatan. Pada tahun 2007, angka melek huruf sekitar 70,89 % sedangkan tahun 2010 angka melek huruf menjadi 79,89 %. Kebijakan dalam hal pemberantasan buta huruf gencar dilakukan dengan apalagi dengan adanya bantuan dana BOS. Dengan adanya bantuan dana BOS diharapkan pelayanan publik bidang pendidikan dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat

khususnya dalam hal pendidikan dasar. Permasalahan yang dihadapi dalam menuntaskan buta huruf di masyarakat adalah masih banyak masyarakat usia lanjut yang tidak dapat membaca dan menulis. Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan kesabaran dan keuletan yang tinggi dari aparat pemerintah sehingga mereka memiliki kembali minat yang kuat untuk bisa membaca dan menulis.

Tinggi rendahnya potensi suatu masyarakat dapat dilihat dari besar kecilnya partisipasinya di bidang pendidikan. Partisipasi di bidang pendidikan ini dapat diukur dari suatu indikator yang disebut dengan Angka Partisipasi Kasar (APK). APK merupakan rasio yang mencerminkan siswa yang masuk untuk semua umur di jenjang pendidikan tertentu (SD, SMP, dan SMU) sebagai persentase total jumlah penduduk menurut kelompok umur yang seharusnya berada di jenjang pendidikan tersebut. Penggolongan kelompok umur di Indonesia dalam hal ini kelompok SD adalah 7 – 12 tahun, SMP adalah 13 – 15 tahun dan SMU 16 – 18 tahun.

Berdasarkan data diatas, menunjukkan adanya peningkatan nilai APK baik untuk tingkat SD, SMP maupun SMU. Pada tahun 2007, nilai APK baik untuk SD, SMP maupun SMU dibawah 80 % bahkan untuk tingkat SMU nilai APK dibawah 70%. Dari data yang ada dapat dilihat bahwa APK untuk tingkat SD dari tahun 2007 sampai tahun 2010 sudah mencapai 90 %. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kecamatan Tanah Pinoh Barat semenjak dimekarkan pada usia SD sudah bersekolah. Untuk tingkat SMP, nilai APK pada tahun 2007 masih 80 %, kondisi tersebut menunjukkan di jenjang pendidikan SLTP/SMP partisipasi semakin menurun, dimana pada tahun 2007 semua anak usia 13 –15 tahun (SMP) di Kecamatan Tanah Pinoh belum seluruhnya bersekolah.

Setelah pemekaran wilayah menunjukkan bahwa perkembangan kondisi pendidikan di Kecamatan Tanah Pinoh Barat semakin baik. Ini ditunjukkan dengan meningkatkan indikator kualitas pendidikan yang semakin meningkat setiap tahunnya. Indikator-indikator tersebut antara lain Angka Partisipasi Kasar (APK), angka melek huruf dan angka putus sekolah. Indikator-indikator tersebut merupakan alat yang selama ini digunakan untuk menilai sejauhmana kualitas pendidikan di suatu daerah. Dari persepsi masyarakat yang menjadi informan, dapat dikatakan bahwa masyarakat merasakan dampak yang positif dalam bidang pendidikan setelah pemekaran wilayah. Kemudahan dalam akses ke pelayanan pendidikan, perbaikan terhadap sarana dan prasarana pendidikan, keterlibatan orang tua dalam pendidikan semakin besar adalah beberapa hal yang dirasakan masyarakat lebih baik dari sebelumnya

b. Pelayanan Kesehatan

Diketahui bahwa fasilitas kesehatan di Kecamatan Tanah Pinoh Barat secara umum belum memadai dapat dikatakan belum representatif. Hal ini dikarenakan jumlah fasilitas kesehatan di beberapa desa kurang sebanding dengan jumlah penduduk dan luas wilayah sehingga mempengaruhi aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan. Kondisi diatas juga menggambarkan bahwa tidak ada perubahan yang berarti dari fasilitas kesehatan sebelum dan sesudah dimekarkannya Kecamatan tanah Pinoh Barat.

Tidak tersedianya fasilitas kesehatan yang lengkap tentu akan berdampak terhadap kualitas pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya desa yang relatif jauh dari pusat-pusat kesehatan seperti Desa Keluas Hulu. Kebijakan yang ditentukan oleh Pemda Melawi sudah tepat dapat dilihat dari luasnya Kecamatan Tanah Pinoh yang berarti harus diperpendek jalur pemerintahannya sehingga dirasa perlu, hanya saja untuk mengefektifkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Tanah Pinoh Barat relatif sama dengan kecamatan lainnya terutama dari segi penganggaran untuk pembangunan, memang untuk kecamatan baru karena untuk membangun berbagai fasilitas publik harus disediakan anggaran yang proporsional.

Kendala pembangunan di Kecamatan Tanah Pinoh Barat sebagai kecamatan baru seperti untuk pemenuhan fasilitas kesehatan adalah menyangkut ketersediaan anggaran untuk melakukan pembenahan di berbagai sektor. Penyediaan anggaran untuk pembangunan wilayah kecamatan merupakan kewenangan dari pemerintah Kabupaten dan DPRD, meskipun saat ini besaran anggaran tersebut ditetapkan berdasarkan usulan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat melalui musrenbang.

Diketahui juga bahwa, alokasi anggaran belum sepenuhnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan untuk setiap Kecamatan dikarenakan Pemda Melawi masih harus fokus membenah tata Kota Kabupaten Melawi sendiri. Pemerintah Kabupaten Melawi masih terkendala dengan kurangnya anggaran untuk pembangunan di kecamatan, karena masih fokus terhadap pembangunan sektor perkotaan. Jelas bahwa Kecamatan Tanah Pinoh Barat sebagai kecamatan baru juga sangat tergantung dengan kebijakan anggaran yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Melawi.

Sama halnya dengan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan di Kecamatan Tanah Pinoh Barat juga masih belum memadai. tenaga kesehatan masih terpusat di Desa Ulak Muid yang merupakan Ibu Kota Kecamatan. Dengan kondisi seperti ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama desa-desa yang jauh dari Ibu Kota Kecamatan. dapat dipastikan bahwa tidak akan terjadi derajat kesehatan masyarakat sebelum dan sesudah dilekukannya pemekaran. Tenaga kesehatan di Kecamatan Tanah Pinoh Barat masih kurang sekali, karena lebih banyak menumpuk di Ibu Kota Kecamatan yaitu Desa Ulak Muid, sementara di desa-desa lainnya masih belum ada sehingga, menurut DPRD sangat perlu perhatian khusus dari Pemda Melawi untuk menyediakan personil atau tenaga kesehatan di desa-desa yang belum ada tenaga kesehatannya. Dapat disimpulkan bahwa pelayanan kesehatan di Kecamatan Tanah Pinoh Barat sebagai daerah pemekaran baru di Kabupaten Melawi belum sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini dikarenakan pilar utama penyelenggaraan layanan kesehatan berupa fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan masih kurang memadai.

c. Pembangunan Infrastruktur

Diketahui bahwa dari status jalan yang terdapat di Kecamatan Tanah Pinoh Barat merupakan jalan Kabupaten dan Jalan Desa. Dan sebagian besar

dari jenis permukaan jalan tersebut adalah jalan tanah. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa semenjak dimekarkan menjadi Kecamatan baru yang lepas dari Kecamatan Induk. Kondisi infrastruktur jalan di Kecamatan Tanah Pinoh Barat tidak mengalami perubahan yang berarti, masyarakat masih tetap mengalami kesulitan apabila musim hujan.

Berdasarkan data diketahui bahwa kondisi jalan di Kecamatan Tanah Pinoh Barat seluruhnya dalam adalah rusak dan rusak berat, tidak terdapat jalan dalam kondisi yang baik. Bahkan terdapat kecenderungan bahwa kondisi jalan yang mengalami rusak berat semakin meningkat. Hasil observasi penulis dilapangan dimana kondisi jalan dari Ibukota Kecamatan Ulak Muid menuju desa-desa lainnya sangat memprihatinkan, apalagi pada musim penghujan. Kondisi jalan yang relative baik adalah dari Kota Baru ke Ulak Muid karena merupakan jalan penghubung antar kecamatan. Selanjutnya untuk desa-desa yang dilalui perkebunan Kepala Sawait kondisi jalannya sudah relatif baik, meskipun tidak beraspal. Tidak dapat dibayangkan kondisi infrastruktur seperti ini dapat mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai sektor kegiatan perekonomian sudah barang tentu akan berdampak terhadap tingginya harga kebutuhan pokok. Tidak dapat dipungkiri keterbelakangan yang terjadi pada masyarakat desa di Kecamatan Tanah Pinoh Barat dikarenakan mereka terisolir dan tidak ada akses sarana dan prasarana umum yang dapat memberikan interaksi masyarakat dengan dunia luar.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan menunjukkan bahwa jarak antara satu desa dengan desa yang lain cukup jauh termasuk dengan Ibu Kota Kecamatan. Meskipun sekarang jalan antar desa sudah terhubung. Hal ini mengindikasikan bahwa sebelum dimekarkan masyarakat desa mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas seperti memeriksakan kesehatan, bersekolah maupun menjual hasil pertanian ke tempat lain. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan masyarakat desa pedalaman mengalami keterbelakangan dalam bidang kesehatan, pendidikan, penguasaan iptek dan lain sebagainya. Kondisi memperlihatkan bahwa hampir seluruh desa yang terdapat di Kecamatan Tanah Pinoh Barat memiliki jarak yang berjauhan dengan pusat kecamatan (Desa Ulak Muid). Kondisi jarak antara desa yang saling berjauhan dengan tidak ditunjang dengan kondisi jalan yang tidak memadai tentu akan mempengaruhi interaksi satu desa dengan desa lainnya. Dilema yang timbul dengan kondisi tersebut adalah apabila terdapat masyarakat yang sakit dan memerlukan perawatan, maka harus dibawa ke Ulak Muid. Dapat dibayangkan betapa sulitnya akses masyarakat hanya untuk memperoleh layanan kesehatan. Kecamatan Tanah Pinoh Barat yang belum mendapatkan layanan listrik dari pemerintah (PLN). Sejauh ini memang sudah ada upaya dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut seperti menyediakan program listrik tenaga surya dan juga dengan swadaya masyarakat desa membuat listrik tenaga diesel, untuk menjangkau desa yang jauh. Namun demikian hal ini belum dapat terlaksana sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan listrik dari seluruh rumah tangga yang ada, sehingga tenaga listrik dari genset menjadi alternatif bagi rumah tangga yang tidak mendapat fasilitas listrik tenaga surya dan listrik tenaga diesel tersebut.

Ditambah telah banyak panel listrik tenaga surya yang rusak, sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak serta faktor ekonomi menjadi kendala terhadap pemakaian sumber energi alternatif dari genset.

Bertitik tolak dari temuan hasil penelitian berkenaan dengan penyediaan infrastruktur bagi masyarakat di Kecamatan Tanah Pinoh Barat menunjukkan bahwa kebijakan pemekaran Kecamatan Tanah Pinoh Barat belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat. Bahkan dapat dikatakan selama 5 tahun dimekarkan tidak ada perubahan yang berarti dalam pembangunan infrastruktur, masyarakat masih tetap harus berjuang dengan kondisi jalan yang rusak untuk melaksanakan kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup.

d. Peningkatan Sosial Ekonomi Masyarakat.

Meskipun tidak secara signifikan dapat mengurangi jumlah penduduk miskin, namun kebijakan pemekaran Kecamatan Tanah Pinoh menjadi Kecamatan Tanah Pinoh Barat telah memberikan manfaat yang baik untuk menggerakkan masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas perekonomian yang dapat membantu menambah penghasilan masyarakat. Hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa adanya pemekaran semakin membuat masyarakat menjadi kreatif dimana sudah mulai tumbuh pusat-pusat kegiatan perekonomian di beberapa desa, meskipun dalam bentuk yang tidak terlalu besar seperti kegiatan jual beli yang tidak lagi terfokus di Ibukota Kecamatan.

Selain menginginkan adanya perbaikan peningkatan efektivitas pelayanan publik masyarakat juga berharap pemekaran kecamatan ini juga dapat mempermudah penyaluran dana pembangunan walaupun dana yang diberikan tidak terlalu besar. Sebelumnya dana pembangunan sering di fokuskan ke ibu kota kecamatan saja dan desa-desa di sekitar ibu kota kecamatan sehingga timbul kecemburuan sosial pada masyarakat di desa-desa lainnya. Selanjutnya aspek penting melihat keberhasilan kebijakan pemekaran kecamatan adalah terjadi peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat setelah dilakukan pemekaran. Terjadinya peningkatan perekonomian masyarakat tidak sepenuhnya disebabkan oleh intervensi dari pemerintah, secara langsung tetapi lebih disebabkan adanya keterlibatan sektor swasta terhadap kegiatan perekonomian masyarakat.

Masalah anggaran merupakan sesuatu yang urgen dalam pembangunan, untuk saat ini memang dapat dikatakan bahwa pemerintah Kabupaten Melawi harus mampu mensiasati anggaran dalam APBD untuk prioritas-prioritas kebutuhan dasar masyarakat di semua daerah di Kabupaten Melawai. Dari hasil pengamatan penulis kondisi ini dapat dimaklumi karena untuk pembenahan infrastruktur di Kota Nanga Pinoh sebagai Ibu Kota Kabupaten Melawai saja belum sepenuhnya tertangani dengan baik, apalagi kalau kita berbicara infrastruktur di kecamatan yang baru terbentuk.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan pemekaran Kecamatan Tanah Pinoh Barat sudah cukup memberikan manfaat bagi pemerintah kecamatan dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya, hanya saja hasil yang diperoleh masih belum maksimal karena penyelenggaraan pemerintahan kecamatan masih dipengaruhi minimnya dukungan sarana dan prasarana serta aparatur yang memadai dalam pemberian pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

2. Kebijakan pemekaran Kecamatan Tanah Pinoh Barat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat terlihat belum efektif terutama untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan perekonomian. Dibidang pendidikan, masih terbatas jumlah fasilitas pendidikan dan tenaga pendidik. Dibidang kesehatan, fasilitas kesehatan masih belum merata di tiap desa dan tenaga kesehatan juga masih minim. Dibidang infrastruktur, belum ada perubahan berarti terhadap kondisi infrastruktur jalan dan listrik kepada masyarakat. Dibidang perekonomian, kondisi kemiskinan yang dialami penduduk masih belum tertangani dengan baik.

B. Saran

1. Diperlukan penambahan staf dan anggaran bagi Kantor Kecamatan Tanah Pinoh Barat selain itu perlu dukungan sarana dan prasarana yang baik guna menunjang kelancaran pemberian pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.
2. Diperlukan ketersediaan anggaran untuk pembenahan fasilitas layanan publik di Kecamatan Tanah Pinoh Barat untuk pengadaan sekolah baru baik SD, SMP dan SMA sesuai dengan kebutuhan, pengadaan fasilitas kesehatan yang proporsional untuk masing-masing desa, dan pembenahan infrastruktur jalan menuju desa, minimal untuk pengerasan tujuannya adalah untuk membuka keterisolasian antara desa di Kecamatan Tanah Pinoh Barat.
3. Diperlukan pendataan kebutuhan pegawai yang selanjutnya dapat dilakukan rekrutmen pegawai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Abidin, Zainal Said. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Anderson, James E. 1997. *Public Policy-Making*. Third Edition. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Dunn, William N. 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Terjemahan Samodra Wibawa. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, Thomas R. 1992. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall.
- Fauzin, N. 2001. *Otonomi Daerah Sumber Daya Lingkungan*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama
- Howlett, Michael, And Ramesh, M. 1995. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*. Oxford: Oxford University Press.

- Islamy, M. Irfan. 1991. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Buni Aksara.
- Imawan, Riswandha. 1999. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik UGM.
- Jones, O. Charles. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Remaja Grafindo Persada.
- Lester, Digman and Stewart. 1995. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. New York: Oxford University Press.
- Kismartini. 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Miles, Matthew B dan Huberman A, Michael.1992. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy, J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustopadidjaya, A.R. 1996. *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan*, Jakarta: LP3ES.
- Nazir. Moh, 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, D Riant. 2006. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- Riyadi. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Santoso, Amir. 1988. *Analisis Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Jurnal Ilmu Politik, No. 3, Gramedia
- Soedarmayanti. 2000. *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi Untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan*. Jakarta: Mandar Maju.
- Soenarko, 2000. *Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijakan Pemerintah*. Surabaya: Patyrus.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI & Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Tangkilisan, Hessel. Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik: Transpormasi Pikiran George Erwards III*, Yogyakarta: Lukman Offset dan Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia.
- Wahab, A Solichin. 2001. *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Reneka Cipta.
- Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijaksanaan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia.

Dokumen :

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 32 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kecamatan Kecamatan Pinoh Utara, Kecamatan Pinoh
Selatan, Kecamatan Belimbing Hulu, dan Kecamatan Tanah Pihoh Barat.
Kabupaten Melawi Dalam Angka 2010.
Kecamatan Tanah Pinoh Barat Dalam Angka 2010.

